UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia**
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Anggono, Bayu Dwi, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.

_____, 2013, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Atok, A. Rosyid Al, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Setara Press, Malang.

Bruggink, J.J.H., (diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta), 2015, *Refleksi tentang Hukum; Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Cetakan ke-5: Citra Aditya Bakti, Bandung

der Vlies, I.C. van, 2005, *Handbook: Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Selatan.

Eliza, Pocut, et al, 2016, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2016*, Cetakan Pertama; BPHN-Kemenkumham, Jakarta Timur.

Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Konsisten Mengawal Konstitusi*, Komisi Hukum Nasional Indonesia, Jakarta.

_____, 2014, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi; serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Kedua; UGM Press, Yogyakarta.

Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum; perspektif ilmu sosial*, Nusa Media, Bandung.

Hamidi, Jazim, et al, 2012, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, Universitas Brawijaya Press, Malang.

Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia**
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

H.R., Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensil Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kansil, C.S.T., 1985, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2013, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan 4: Alumni, Bandung.

Lailam, Tanto, 2017, *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mahfud MD, Moh., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Meuwissen, 2013, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-4: Refika Aditama, Bandung.

Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Idnonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo, Jakarta.

_____, et al, 2018, *Serpihan Pemikiran Hukum,* Genta Publhising, Yogyakarta.

Montesquieu, 2015, *The Spirit of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik,* Cetakan ke-15; Nusa Media, Bandung.

N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, 1983, Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae* (Belanda-Indonesia), Cetakan Pertama: Binacipta.

Nasution, Adnan Buyung, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia (Studi Socio-Legal atas Konstituante 1956-1959)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia**
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

N.D., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-5; Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sadiawati, Diani, et al, 2015, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi (Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib)*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Sinamo, Nomensen, 2016, *Ilmu Perundang-undangan*, Permata Aksara, Bekasi.

Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnanin, 2015, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Setara Press, Malang.

Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta.

_____, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, PT Kanisius, Yogyakarta.

_____, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya)*, PT Kanisius, Yogyakarta.

Syahuri, Taufiqurahman, 2004, *Hukum Konstitusi; Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tambunan, A.S.S., 2002, *Politik Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Puporis, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tanya, Bernard L., et al, 2013, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-4: Yogyakarta.

Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK: Cetakan Pertama, Jakarta.

Yuliandri, 2013, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal Hukum:

Suska, "Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2011.

Tardjono, Heriyono, "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Renaissance*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2016.

Triningsih, Anna, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perudang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2006.

C. Internet:

Website Resmi Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN): http://www.bphn.go.id/news/201502262233524/OECD-COFEMER-Mexico-British-Embassy-Jakarta-dan-BPHN-lakukan-Kegiatan-FGD-tentang-Regulasi diakses pukul 13:20 pada tanggal 17 Februari 2016.

Website Resmi *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC): http://www.apec.org/Groups/Economic-Committee/Toolkit-for-Structural-Reform/APEC-OECD-Integrated-Checklist diakses pukul 22:09 pada tanggal 16 Februari 2017.

Website Resmi Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN): http://www.bphn.go.id/news/2015032007545262/ASEAN-OECD-GOOD-REGULATORY-PRACTICE-CONFERENCE-2015-on-Regulatory-Coherence-for-Regional-Connectivity-and-Global-Competitiveness diakses pukul 01:31 pada tanggal 18 Februari 2017.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Website Resmi OECD: https://www.oecd.org/about/ diakses pukul 14:47 pada tanggal 17 Februari 2017.

Website Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU diakses pukul 00:50 pada tanggal 15 Agustus 2017.

Website Resmi European Union: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154381.htm diakses pukul 01:12 pada tanggal 29 Desember 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, diakses melalui: https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda.

Diakses tanggal 8 November 2017 pada Pukul 03:49 WIB, melalui: https://share.ansi.org/Shared%20Documents/Standards%20Activities/International%20Standardization/Standards%20Alliance/Indonesia/Indonesia_Good_Regulatory_Practice_March%2015-16,2017/Presentations/Indonesian%20Speakers/1.1_Dr_Enny%20Nurbaningsih_GRP_In_Indonesia_System.pdf

Diakses tanggal 9 November 2017 pada Pukul 00:07 WIB, melalui: http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html

Diakses tanggal 12 November 2017 pada Pukul 01:17 WIB, melalui: http://nasional.kompas.com/read/2017/04/10/14231381/kemendagri.akan.perketat.kontrol.pembahasan.perda

Diakses tanggal 12 November 2017 pada Pukul 11:48 WIB, melalui: https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170123/281633894947192

Diakses Tanggal 2 Desember 2017 pada Pukul 17:09 melalui https://kumparan.com/zainal-muchtar/perihal-menata-regulasi

Diakses pada Pukul 17:04 Tanggal 11 Januari 2018 melalui http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a0acec9c86f9/tiga-tahun-uu-administrasi-pemerintahan

Diakses pada Pukul 20:04 Tanggal 11 Januari 2018 melalui http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html

Diakses pada tanggal 12 Januari 2018 pada Pukul 11:49 WIB melalui http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/07044091/yusril--saya-akan-lawan-uu-pemilu-yang-baru-disahkan-ke-mk

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia**
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Diakses tanggal 13 Januari 2018 pada pukul 03:57, melalui: http://nasional.kompas.com/read/2017/11/11/20321471/atasi-obesitas-regulasi-jokowi-diminta-keluarkan-perpres-gantikan-semua

Diakses pada Pukul 08:57 Tanggal 15 Februari 2018 melalui https://nasional.tempo.co/read/1060822/uu-md3-disahkan-mahfud-md-dpr-kacaukan-garis-ketatanegaraan

Diakses pada Pukul 13:04 Tanggal 28 Februari 2018 melalui https://kompas.id/baca/opini/2018/02/28/uumd3-dan-problem-legislasi/

Diakses tanggal 14 Maret 2018 pada Pukul 00:09 WIB, melalui: https://indopos.co.id/read/2018/02/20/128121/pemekaran-daerah-cenderung-timbulkan-masalah-baru

Diakses tanggal 14 Maret 2018 pada Pukul 02:01 WIB, melalui: https://nasional.kompas.com/read/2018/03/14/17292911/jokowi-saya-pastikan-tidak-menandatangani-uu-md3

Diakses pada Pukul 23:14 Tanggal 3 Juli 2018 melalui: https://pshk.or.id/blog-id/menggagas-prolegnas-berkualitas/

Diakses pada Pukul 00:02 Tanggal 4 Juli 2018 melalui: http://ipc.or.id/evaluasi-terhadap-program-legislasi-nasional-2015-2019-dewan-perwakilan-rakyat-1/

Diakses pada Pukul 02:59 Tanggal 4 Juli 2018 melalui: http://parlemenindonesia.org/wp-content/uploads/2018/01/catatan-akhir-tahun-2017.pdf

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), "Urgensi Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan" dapat diakses melalui: ,http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=adf51e610f57825b22df6b181f45a5af&docid=pantauan,30 Januari 2010

D. Sumber Lain:

Attamimi, A. Hamid S., 1990, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Utusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV)", *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Yuliandri, 2007, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Bayu Dwi Anggono, 2014, "Asas Materi Muatan yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012)", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Badjeber, Zain, Mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI 1999-2004 dan Aktif dilegislasi sejak 1964-2006, wawancara Tanggal 11 Juni 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Resmi Rapat Paripurna 2014-2015.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2015, "Laporan Kinerja DPR (1 Oktober 2014-13 Agustus 2015); Langkah DPR Menuju Parlemen Modern Dalam Demokrasi Idnonesia, Jakarta.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), 2017, "Catatan Evaluasi Akhir Tahun 2017: Tahun Gelap Bagi DPR", Jakarta; 21 Desember.

Susanti, Bivitri, "Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Konteks Negara Hukum", Jakarta, 9 Oktober, 2014.

Utama, Sasmito Jati, "Penerapan *Regulatory Impact Assessment* dalam Proses Kebijakan Publik", *Academia.edu*, San Fransisco, 17 Februari, 2017.

Shigetomi, Kent, 2015, "Modul PPT: *Overview of Good Regulatory Practice*", *Office of the U.S. Trade Representative*, Amerika Serikat.

EMP/RSS, "*Good Regulatory Practices: Guidelines for National Regulatory Authorities for Medical Products"*, *WHO Draft*, 16 Oktober, 2016.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Resmi Rapat Paripurna 2014-2015.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Naskah Akademik tentang Administrasi Pemerintahan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta.

Marzuki, Laica, 2017, Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia**
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2016.

Yose Rizal Damuri, Pande Radja Silalahi, "*Good Regulatory in Indonesia; EAS Regulatory Roundtable II, Engendering GRP, Responsive Regulations and Regulatory Connectivity in ASEAN and East Asia*", Centre for Strategic and International Studies, Jakarta; 29 September 2014.

Yasin, Muhammad, et al, 2017, Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Universitas Indonesia-*Center for Study of Governance and Administrative Reform* (UI-CSGAR), Jakarta.

Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, "Kajian Ringkas: Pengembangan dan Implementasi Metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan Di Kementerian PPN/BAPPENAS", Jakarta, 12 Juli, 2011.

S. Jacobs, 2006, *Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA inti Policy-making*, Jacobs and Associates, Washington DC.

Suparmiatun, Emmy, et al, 2011, "Kajian Ringkas: Pengembangan dan Implementasi Metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan Di Kementerian PPN/BAPPENAS", Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta.

Parker, David, "*Regulatory Impact Assessment*", Management Fokus, Issue 24, Winter, Inggris, 2006.

Rekomendasi Jember tentang Penataan Regulasi di Indonesia melalui acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 pada tanggal 12 November 2017, Jember.

Penjelasan Maklumat Wakil Presiden Nomor X.

E. Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia**
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Maklumat Wakil Presiden Nomor X.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia**
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia**
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729).

Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 80).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia**
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penetapan Presiden Nomor 28 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 176).

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2684).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun I Nomor 2 halaman 10 kolom 3).

Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang Susunan Kabinet II (Berita Republik Indonesia Tahun I Nomor 2 halaman 9 kolom 3-4).

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mepersiapkan Rancangan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1125).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 10/DPR-GR/III/1967-1968 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

F. Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
MUAMMAR ASMIE, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.,
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 mengenai putusan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai putusan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 mengenai putusan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.